

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Kramatmulya merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kuningan yang memiliki karakteristik wilayah berupa perpaduan antara kawasan permukiman, pertanian, dan potensi pariwisata. Kecamatan ini terdiri atas 14 desa, dan di antaranya terdapat dua desa yang telah dikembangkan sebagai desa wisata, yaitu Desa Wisata Cikaso dan Desa Wisata Pajambon. Keberadaan desa wisata tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kramatmulya memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis alam dan masyarakat, yang apabila dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal secara berkelanjutan.

Desa Cikaso merupakan salah satu desa wisata yang memiliki potensi cukup menonjol di Kecamatan Kramatmulya. Desa ini memiliki daya tarik utama berupa kawasan Sawah Lope, yaitu hamparan persawahan yang luas dengan panorama alam yang indah berlatar Gunung Ciremai serta didukung oleh ketersediaan sumber mata air yang melimpah. Selain berfungsi sebagai lahan pertanian bagi masyarakat, kawasan ini juga berkembang menjadi destinasi wisata alam dan ekowisata yang diminati oleh wisatawan untuk bersantai, berolahraga, maupun menikmati suasana pedesaan yang sejuk dan asri. Selain sawah lope, Desa Cikaso juga didukung oleh objek wisata lain seperti Kolam Renang Cimalati dan Bukit Perkemahan Panagaran yang semakin memperkaya daya tarik wisata desa tersebut.

Sementara itu, Desa Pajambon juga memiliki potensi pariwisata yang beragam dan bernilai strategis. Desa ini didukung oleh daya tarik utama, seperti Agrowisata Pakuwon yang menawarkan wisata edukasi pertanian melalui kegiatan petik jambu merah, wahana air papalidan, serta berbagai spot foto menarik dengan latar Gunung Ciremai. Selain itu, terdapat Lembah Cilengkrang yang menawarkan panorama alam pegunungan, sumber air panas alami, dan curug yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Keberagaman potensi tersebut menjadikan Desa

Pajambon sebagai kawasan yang prospektif untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Program pengelolaan desa wisata pada dasarnya tidak hanya berfokus pada pengembangan objek wisata semata, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan pendukung yang saling berkaitan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Program tersebut meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan sarana dan prasarana wisata, promosi dan pemasaran wisata, pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, pelatihan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan kebersihan dan lingkungan wisata, serta penguatan kelembagaan pengelola desa wisata. Melalui program tersebut, desa wisata diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya melibatkan beberapa unsur, yaitu pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan masyarakat setempat. Pemerintah desa berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan terhadap pengembangan desa wisata. Pokdarwis berperan sebagai kelompok penggerak masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, seperti pengelolaan objek wisata, pelayanan wisatawan, promosi wisata, menjaga kebersihan lingkungan wisata, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai sapa pesona dan sadar wisata. Sementara itu, BUMDes berperan dalam pengelolaan unit usaha wisata desa, pengembangan fasilitas wisata, serta pengelolaan pendapatan wisata desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan anggaran dan inovasi dalam pengembangan wisata. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang dimiliki dengan efektivitas pengelolaan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya telah berjalan secara efektif.

Kondisi sosial masyarakat di Desa Cikaso dan Desa Pajambon menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan. Di Desa Cikaso, masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap potensi wisata yang dimiliki desa, namun pengelolaan wisata masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam aspek pengelolaan, sosialisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, kondisi di Desa Pajambon menunjukkan tantangan yang lebih kompleks, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai tata kelola wisata, minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan desa wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata di kedua desa masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Kuningan memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan berkembangnya berbagai desa wisata yang tersebar di beberapa wilayah. Pengembangan desa wisata tersebut didukung oleh kebijakan Desa Pinunjul Wisata yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuningan Nomor 050/Kpts.59-Bappeda/2019 sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemanfaatan potensi alam maupun budaya daerah. Sebagian besar desa wisata di Kabupaten Kuningan mengusung konsep ekowisata yang menekankan pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan. Salah satu desa yang termasuk dalam kategori Desa Pinunjul Wisata tersebut adalah Desa Pajambon di Kecamatan Kramatmulya yang memiliki potensi wisata alam dan agrowisata yang cukup berkembang.

Perkembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan, dapat dilihat melalui data desa wisata yang telah terverifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif. Data tersebut menunjukkan kategori perkembangan desa wisata, mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri. Adapun data desa wisata terverifikasi di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Desa Wisata Terverifikasi di Kabupaten Kuningan

No	Desa Wisata	Kategori
1.	Cibuntu	Mandiri
2.	Cibuntu, Kampung Adat Bojong Honje	Rintisan
3.	Cikaso	Berkembang
4.	Cisantana	Rintisan
5.	Desa Wisata Pajambon	Rintisan
6.	Kaduela	Rintisan
7.	Maniskidul	Rintisan
8.	Nanggerang	Rintisan
9.	Paniis	Rintisan
10.	Puncak	Rintisan
11.	Sukarapih	Maju
12.	Tundagan	Rintisan

Sumber: <https://jadesta.kemenpar.go.id/sebaran>

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai data desa wisata terverifikasi di Kabupaten Kuningan yang bersumber dari Jadesta Kemenparekraf, dapat diketahui bahwa hingga saat ini terdapat 12 desa wisata yang telah memperoleh status verifikasi resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari keseluruhan desa tersebut, sebagian besar masih berada pada kategori “Rintisan”, sedangkan hanya beberapa yang telah mencapai kategori “Berkembang”, “Maju”, atau “Mandiri”. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata, sebagian besar desa masih dalam tahap awal pengelolaan yang memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Potensi desa wisata yang dimiliki Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan yang optimal. Sejalan dengan kondisi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan secara umum, sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang menyebutkan belum optimalnya penataan daya tarik wisata, belum optimalnya sarana dan prasarana pemasaran pariwisata, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Selain itu, hasil wawancara dengan pengelola desa wisata Cikaso dan Pajambon mengkonfirmasi temuan serupa, yaitu rendahnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pariwisata, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran dalam pengelolaan desa wisata dan kurangnya pelatihan dalam pengelolaan desa wisata. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan program desa wisata di Kabupaten Kuningan masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks kebijakan daerah, pengembangan desa wisata di Kabupaten Kuningan memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Kuningan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tahun 2020–2028. Regulasi tersebut menegaskan arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Pasal 51 dalam Perbup tersebut secara khusus mengatur Peran Serta Masyarakat, yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan untuk meningkatkan sadar wisata, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung peningkatan kualitas destinasi. Ketentuan ini sangat relevan dengan keberadaan Pokdarwis sebagai motor penggerak utama desa wisata, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata bergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan Masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan desa wisata di Kabupaten Kuningan didasarkan pada prinsip pengelolaan pariwisata berbasis Komunitas (*community*

based tourism). Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama tidak hanya memperkuat kepemilikan terhadap setiap inisiatif pengembangan atraksi dan fasilitas wisata, namun juga diyakini mampu meningkatkan dampak sosial ekonomi dan menjaga pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi fokus utama, mendorong terbentuknya usaha mikro, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), BUMDes pariwisata, serta kolaborasi lintas sektor dalam mengelola dan memasarkan potensi desa wisata secara berkelanjutan. Dengan adanya regulasi tersebut, seluruh pihak diharapkan bekerja secara sinergis untuk menciptakan desa wisata yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan pembangunan daerah.

Selain memperhatikan aspek pengelolaan program, pengembangan desa wisata juga perlu memperhatikan standar pelayanan wisata yang baik. Standar tersebut mencakup kebersihan lingkungan wisata, kenyamanan dan keamanan pengunjung, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, keramahan pelayanan, aksesibilitas, informasi wisata, serta kualitas pengelolaan destinasi wisata. Pemenuhan standar pelayanan wisata menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepuasan wisatawan dan keberlanjutan pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan desa wisata tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga dari kemampuan pengelola dalam menyediakan pelayanan wisata yang berkualitas bagi pengunjung.

Pengembangan desa wisata juga menjadi perhatian pemerintah secara nasional, berdasarkan data dari laman Badan Otorita Borobudur Dalam upaya menuju destinasi wisata berkelas dunia, Kementerian Pariwisata pada tahun 2025 menetapkan lima program unggulan, salah satunya adalah Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas. Desa wisata menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Program ini akan terus diperkuat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas desa wisata di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Desa Wisata Berkelanjutan.

Namun, temuan awal penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas di lapangan. Berdasarkan hasil observasi awal serta komunikasi langsung dalam proses perizinan penelitian, pihak Bidang Program Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa: “Masih terdapat beberapa desa wisata yang pengelolaannya belum optimal. Masyarakat di beberapa desa tersebut dinilai masih kurang aktif dalam pengelolaan serta menunjukkan komitmen yang lemah terhadap pengembangan desa wisata.” Pernyataan tersebut menguatkan bahwa Kecamatan Kramatmulya yang didalamnya terdapat dua Desa wisata, yaitu desa wisata Cikaso (Berkembang) dan Desa Wisata Pajambon (Rintisan) yang penting untuk dikaji sejauh mana Efektivitas Program Pengelolaan Desa Wisatanya.

Kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan pentingnya efektivitas pengelolaan desa wisata yang tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana desa mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Desa wisata yang efektif bukan hanya yang ramai dikunjungi, melainkan yang mampu memberdayakan masyarakatnya sebagai pelaku utama, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta membangun sistem pengelolaan yang berkesinambungan antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas program pengelolaan desa wisata di Desa Cikaso dan Desa Pajambon perlu dilihat dari kemampuan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang partisipatif, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Penelitian mengenai desa wisata di Kabupaten Kuningan pada umumnya berfokus pada aspek potensi wisata, strategi pengembangan wisata, peningkatan kunjungan wisatawan, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya dengan menggunakan teori

Sedarmayanti (2009) yang mencakup dimensi input, proses produksi, hasil (output), dan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis efektivitas program pengelolaan desa wisata secara lebih komprehensif, khususnya di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah desa, Pokdarwis, serta dinas terkait untuk meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata sehingga menghasilkan output yang berkualitas, proses pengelolaan yang efisien, dan produktivitas program yang optimal sesuai teori Sedarmayanti (2009). Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi untuk dikaji lebih lanjut dalam judul **“Efektivitas Program Pengelolaan Desa Wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengelolaan Desa Wisata. Masih terdapat keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan desa wisata, baik dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta minimnya pelatihan yang diberikan kepada pengelola, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan program secara optimal.
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Desa Wisata. Pelaksanaan program pengelolaan desa wisata belum berjalan maksimal, ditandai dengan belum optimalnya penataan daya tarik wisata, keterbatasan sarana dan prasarana pemasaran, serta pemanfaatan media promosi yang belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, pelaksanaan pelatihan bagi pengelola masih terbatas dan belum berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata belum optimal.
3. Belum Maksimalnya Hasil Pengelolaan Desa Wisata. Hasil pengelolaan desa wisata belum menunjukkan capaian yang optimal,

terlihat dari belum meratanya pengembangan daya tarik wisata serta belum maksimalnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan meskipun media promosi telah tersedia.

4. Belum Efisiennya Pemanfaatan Sumber Daya dalam Pengelolaan Desa Wisata. Pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan desa wisata belum berjalan secara efisien, sehingga program yang dilaksanakan belum mampu menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Input program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana Proses produksi program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana Hasil (Output) program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?
4. Bagaimana Produktivitas program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan?

D. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis input dalam program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses produksi dalam pelaksanaan program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil (output) dari program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis produktivitas program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara ilmiah (signifikan akademik) maupun secara praktis (signifikan sosial/kemanusiaan) sebagai berikut;

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan efektivitas program pemerintah di bidang pariwisata. Penelitian ini memperluas penerapan teori efektivitas Sedarmayanti (2009) yang mencakup empat indikator utama, yaitu Input, Proses Produksi, Hasil (output), dan Produktivitas. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana teori efektivitas dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan program pengelolaan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kajian akademik tentang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis komunitas (*community based tourism*).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), dalam menilai sejauh mana program pengelolaan desa wisata telah dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terutama Desa Cikaso dan Desa Pajambon, dalam meningkatkan koordinasi serta pembinaan terhadap masyarakat desa wisata agar dapat mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berdaya saing. Bagi masyarakat dan kelompok pengelola desa wisata (Pokdarwis), hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran aktif mereka dalam keberhasilan program, serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan kegiatan wisata. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi

bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian serupa mengenai efektivitas program dan kebijakan publik, terutama dalam bidang pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat di daerah lain.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan alur input–proses–output. Pada tahap input, penelitian ini berangkat dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program pengelolaan desa wisata, seperti potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, rendahnya partisipasi masyarakat, pengelolaan yang belum berkelanjutan, serta koordinasi dan evaluasi yang masih kurang efektif.

Dalam penelitian ini, efektivitas program pengelolaan desa wisata dianalisis menggunakan teori efektivitas (Sedarmayanti, 2009) yang menilai keberhasilan suatu organisasi atau program berdasarkan empat dimensi utama, yaitu input, proses produksi, hasil (output), dan produktivitas. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka penilaian yang sistematis dari sisi ketersediaan sumber daya, mekanisme pelaksanaan, capaian program, hingga tingkat pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Adapun keempat dimensi menurut (Wadjdi, 2022) adalah sebagai berikut:

1) Input

Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Input dapat dipahami sebagai dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang nantinya akan memengaruhi hasil yang dicapai. Unsur input meliputi sumber daya manusia (SDM), fasilitas fisik (sarana dan prasarana), material atau bahan baku berupa data yang dibutuhkan, serta modal atau anggaran. Tanpa ketersediaan input yang memadai, program sulit berjalan dengan baik karena tidak memiliki dukungan sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2) Proses Produksi

Proses produksi menggambarkan tahap ketika berbagai input tersebut diolah oleh sistem atau unit pengelola agar menjadi keluaran yang

diinginkan. Pada tahap ini, yang dinilai bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga bagaimana prosedur kerja diterapkan, bagaimana koordinasi antar bagian dilakukan, serta sejauh mana proses berjalan sesuai dengan rencana. Proses produksi yang baik ditandai dengan alur kerja yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memastikan setiap kegiatan mengarah pada pencapaian tujuan program.

3) Hasil (Output)

Hasil (output) merupakan komponen dalam sistem yang berupa berbagai bentuk keluaran yang dihasilkan dari proses pengolahan. Output dapat berupa kuantitas maupun bentuk fisik dari kinerja suatu kelompok atau organisasi. Hasil tersebut dapat dinilai melalui perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), serta dilihat dari produk yang dihasilkan maupun jasa berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi terkait.

4) Produktivitas

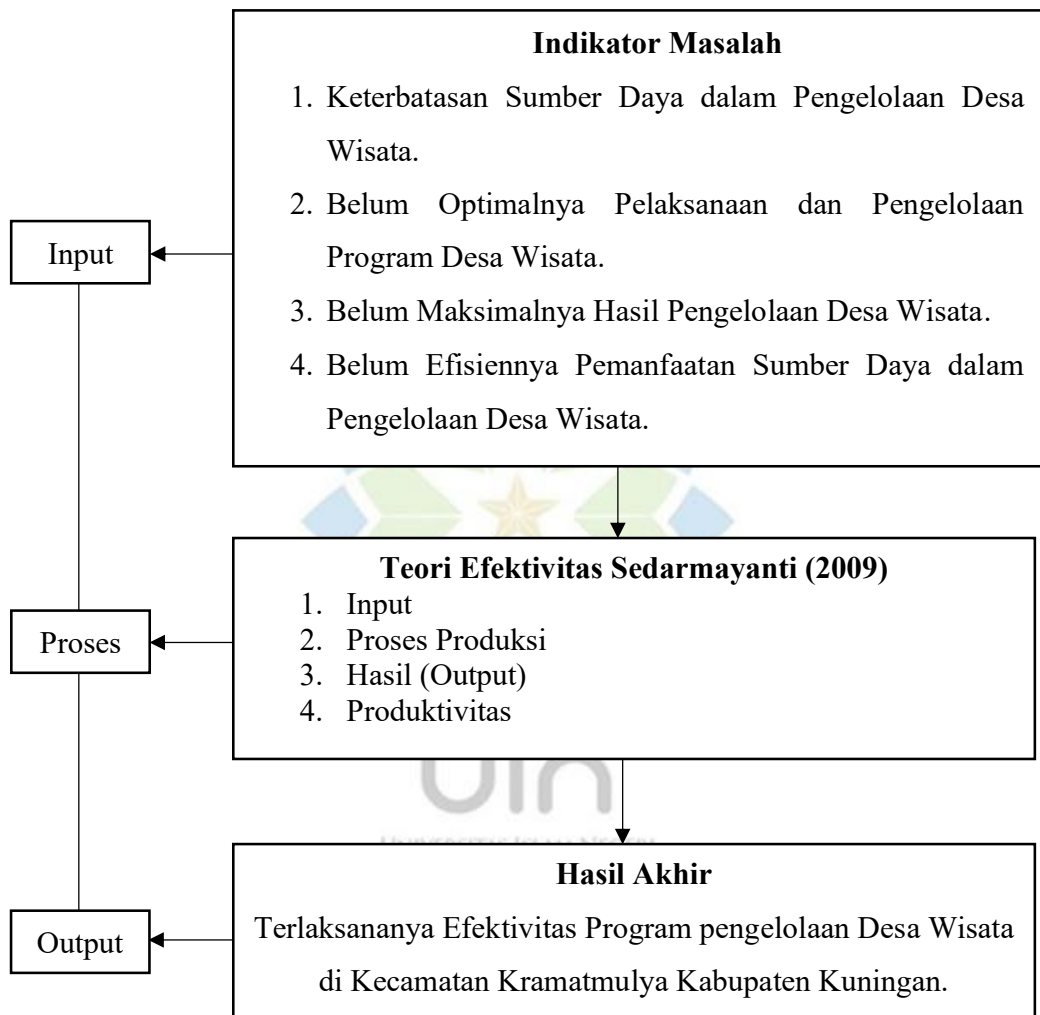
Produktivitas merupakan ukuran efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya di dalam organisasi, yang umumnya dinyatakan sebagai perbandingan antara hasil (output) yang diperoleh dengan sumber daya (input) yang digunakan. Dalam dimensi ini, produktivitas digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan output secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas menurut Sedarmayanti digunakan karena mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif melalui empat dimensi utama, yaitu input, proses produksi, output, dan produktivitas. Keempat dimensi tersebut dinilai relevan untuk menganalisis efektivitas program pengelolaan desa wisata, karena tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, proses pelaksanaan, serta keberlanjutan program.

Hasil akhir atau output dari kerangka berpikir ini adalah teridentifikasinya tingkat efektivitas program pengelolaan desa wisata di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan, sehingga dapat memberikan Gambaran mengenai

keberhasilan program sekaligus menjadi dasar perbaikan ke depan. Adapun kerangka berpikir jika disajikan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, (2025)